

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No. 146 Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293

Telp. (022) 7278484, Fax. (022) 7278382, Email: upt_bandung@postel.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I BANDUNG**

Jl. Pacuan Kuda No. 146 Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
Telp. (022) 7278484, Fax. (022) 7278382
Email: upt_bandung@postel.go.id

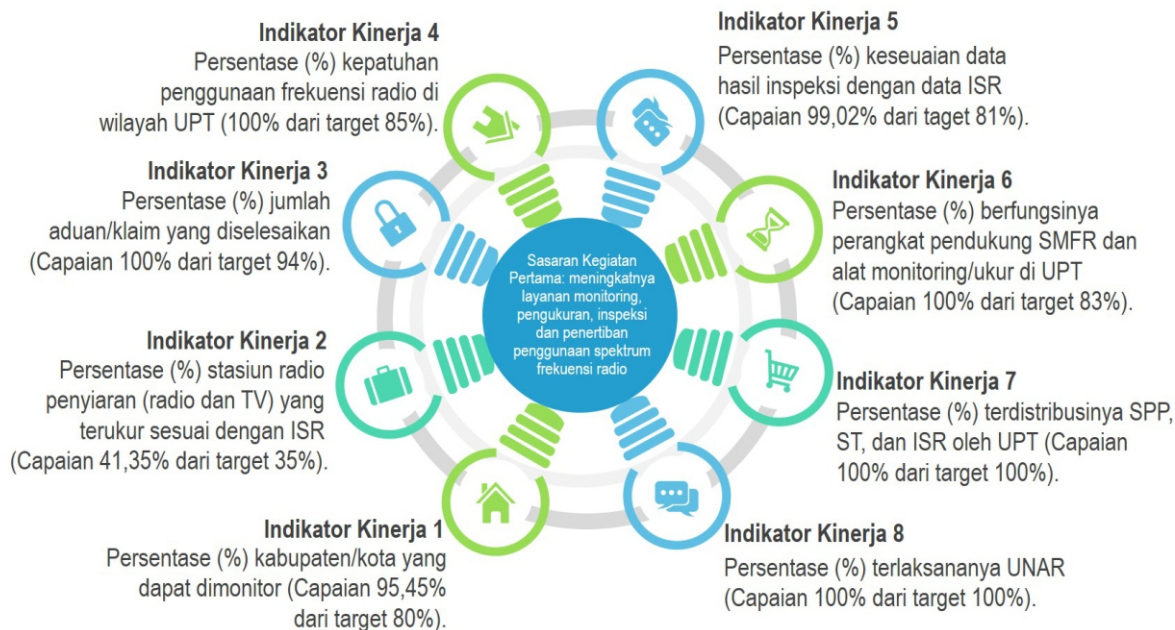
Ringkasan Eksekutif

ICT (*information and communication technologies*) terbukti menjadi salah satu pendorong pembangunan di suatu negara. Peranan tersebut mengharuskan sektor ini terus bergerak dan bertransformasi. Transformasi yang dimaksud terkait pengembangan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas dan menciptakan kesempatan kerja. Namun, transformasi tersebut memerlukan aksi dari semua pemangku kepentingan baik individu, pembisnis, dan pemerintah. Tiga pelaku ini memiliki korelasi terhadap tingkat penetrasi teknologi informasi.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi antar negara dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas wilayah negara, jarak, dan waktu. Perkembangan dan kemajuan tersebut telah mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi radio semakin besar. Oleh sebab itu, dituntut peran pemerintah yang semakin besar untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Jawa Barat yang bersifat mandiri di bawah unit eselon I Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Sasaran kegiatan yang pertama adalah meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dengan jumlah indikator sebanyak 6 (enam) indikator. Sasaran kegiatan kedua adalah terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator.



Gambar 1. Capaian Kinerja Tahun 2018



Gambar 2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018, capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dari sejumlah indikator kinerja tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.	80,00%	95,45%	119,31 %
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR.	35,00%	41,35%	118,14%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.	94,00%	100,00%	106,38%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT.	85,00%	100,00%	117,65%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR.	81,00%	99,02%	122,25%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.	83,00%	90,16%	108,63%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.	100,00%	100,00%	100 %
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR.	100,00%	100,00%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100,00%	100,00%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100,00%	100,00%	100%

Sasaran Kegiatan Pertama: ***"Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio"*** terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1: *Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor.*

Pada tahun anggaran 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 (tiga belas kegiatan) kegiatan untuk observasi dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio yang ada di 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Realisasi pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi radio tersebut adalah 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota dari jumlah target kabupaten/kota termonitor sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 95.45% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 80%. Pelaksanaan 13 (tiga belas) kali kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan perhitungan okupansi penggunaan 21 (dua puluh satu) subservice spektrum frekuensi radio dan pelacakan penggunaan frekuensi ilegal yang ada di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota Propinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja 2: *Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.*

Pada tahun anggaran 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar 35% dari 341 ISR yang terdaftar pada data SIMF. Sampai dengan bulan Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 41,35% yaitu 118 stasiun Radio Siaran FM dan 23 stasiun televisi siaran analog di wilayah Jawa Barat dari target 35%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja dan target penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 118.14%

Indikator Kinerja 3: *Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.*

Pada tahun anggaran 2018, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target 18 (delapan belas) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Jawa Barat dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 18 kali kegiatan di tahun 2018 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan dengan persentase capaian kinerja sebesar 106.38%

Indikator Kinerja 4: *Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT*

Pada tahun anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 85% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, sementara pada program kerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 11 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 2 kali di wilayah Jawa Barat. Selama tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 15 kali kegiatan dengan hasil telah disita sebanyak 15 (lima belas) pelanggar dan yang diperingatkan sebanyak 81 (delapan puluh satu) pelanggar. Kemudian, kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan terhadap 96 (sembilan puluh enam) jumlah pengguna frekuensi ilegal dengan hasil penindakan dalam bentuk pembinaan, dengan tindak lanjut pemusnahan barang bukti. Persentase Capaian kinerja kegiatan penertiban ini adalah 117.65%.

Indikator Kinerja 5: *Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR*

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target 81% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) data sampel ISR yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Jumlah target kegiatan inspeksi tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 9 (Sembilan) kegiatan di wilayah Jawa Barat, data yang dapat diinspeksi adalah 1.621 (seribu enam ratus dua puluh satu) frekuensi link yang terdiri dari 6 (enam) sesuai ISR, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) tidak sesuai ISR, 1.032 (seribu tiga puluh dua) tidak digunakan, 46 (empat puluh enam) proses perijinan, capaian kinerja kegiatan inspeksi ini adalah 122.25%.

Indikator Kinerja 6: *Persentase (%)berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT.*

Pada tahun anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target 83%, berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap dalam kondisi baik dan terawat.

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas I Bandung juga melakukan inspeksi rutin perangkat SMFR di empat lokasi yaitu di Lembang, Cileunyi, Cigondewah dan Cirebon. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT.

Indikator Kinerja 7: *Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT*

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung juga memiliki target 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP), sampai dengan posisi Desember 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pendistribusian SPP, ST dan ISR di wilayah Jawa Barat sebanyak 811 SPP baru dan perpanjangan serta 165 Surat Tagihan. Dari semua SPP dan ST yang ada telah terdistribusi, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%

Indikator Kinerja 8: *Persentase (%) terlaksananya UNAR*

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 target pelaksanaan UNAR ditetapkan 100%. Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung merencanakan 2 (dua) kali kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan UNAR sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kabupaten Garut dan di Kota Bandung dengan total peserta 914 terdiri dari; peserta YD sejumlah 823 (delapan ratus dua puluh tiga) orang, YC sejumlah 70 (tujuh puluh) orang dan YB sejumlah 21 (dua puluh satu) orang, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah tercapai 100% sesuai yang ditargetkan.

Sasaran Kegiatan Kedua: **“Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada tahun 2018, terdapat 2 (dua) kegiatan layanan; eksternal dan internal pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang merupakan layanan eksternal sebagai bentuk pelayanan publik dan layanan internal sebagai bentuk layanan administrasi. Kegiatan ini merupakan manivestasi pelayanan Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat.

Indikator Kinerja 1: *Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio*

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP

frekuensi radio di wilayah Jawa Barat. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang dilimpahkan ke 6 (enam) KPNL di Jawa Barat, dengan demikian maka capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tercapai 100%

Indikator Kinerja 1: Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan merupakan kegiatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, adapun kegiatan tersebut adalah:

a. Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran

Pada tahun 2018 program kerja yang disusun oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki komposisi anggaran dengan total sebesar Rp. 14.500.949.000,- (empat belas miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.144.117.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp. 7.356.832.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 1.252.935.000,-	49 Layanan
2	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 318.900.000,-	16 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	Rp. 4.028.063.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 139.550.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 8.761.501.000,-	12 bulan layanan

b. Ketatausahaan dan Rumah Tangga

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementrian Kominfo, Ditjen SDPPI, dan jajaran pemerintah maupun swasta mitra Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang ada di Wilayah Propinsi Jawa Barat.

- Surat masuk selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) surat.
- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 18 (delapan belas) kontrak

c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki sumber daya manusia sejumlah 36 (tiga puluh enam) pegawai ASN, 2 (dua) pegawai Non ASN, dan 34 (tiga puluh empat) tenaga outsourcing.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 3 pegawai, golongan III sejumlah 22 pegawai dan golongan II sejumlah 11 pegawai. Pada tahun 2018 terdapat 7 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 16 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 7 pegawai, S1 sejumlah 12 pegawai, D3 sejumlah 3 pegawai dan SMA sejumlah 13 pegawai serta SD sejumlah 1 pegawai

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2018 adalah terserap sebesar Rp. 13.345.249.884,- dari pagu Rp. 14,500,949,000,- atau sebesar 92.03%.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melakukan revisi DIPA sebanyak 4 kali revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan sedangkan 2 kali berupa revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan (refocusing) dan revisi pagu minus.

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, karena atas Kuasa-Nya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dapat menyelesaikan target program kegiatan tahun anggaran 2018 dan menyelesaikan penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2018, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik, bahan masukan, dan koreksi kegiatan tahun berikutnya. Sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja secara tepat guna dan sasaran. Laporan ini merupakan informasi terpadu antara anggaran dengan sasaran dan keluaran kegiatan yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas instansi.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dapat bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Bandung, Januari 2019

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I BANDUNG**



HARI PRASETYO

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
C. Potensi Dan Permasalahan Strategis	15
D. Sistematika Pelaporan	18
BAB II PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	19
B. Sasaran Program	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	24
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	24
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	26
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	28
4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	29
5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR	31
6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	33
7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	34
8. IK-7 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	35
Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yang Bersih, Efisien Dan Efektif	35
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	35

2. IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	36
B. Kinerja Lainnya	52
1. Dukungan Kegiatan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang	52
2. Upgrade ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015	53
C. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	56

Bab 1 Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan yang sangat pesat di sektor telekomunikasi tidak terlepas dari peran Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Direktorat Jenderal SDPPI), sebuah Direktorat yang merupakan salah satu unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai organisasi yang mengelola regulasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI akan menentukan norma, standar, kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau institusi pengelola layanan di bidang telekomunikasi, pos, dan informatika. Regulasi-regulasi tersebut juga berlaku bagi masyarakat secara umum dan para penyelenggara bidang telekomunikasi khususnya.

Agar regulasi tersebut dapat diaplikasikan, maka aspek penyadaran masyarakat, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum harus dilakukan dan ditegakan. Sedangkan sebagai organisasi pengelola layanan publik, Direktorat Jenderal SDPPI harus memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan preferensi masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang sempurna, profesional, dan berintegritas harus terus dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur.

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu andalan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan negara bukan pajak dari Sektor Telekomunikasi menjadikan Sektor Telekomunikasi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak nomor dua setelah minyak dan gas.

Kedepan, upaya untuk mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan terus diupayakan dengan menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat pos dan informatika. Dengan demikian cita-cita menuju Indonesia yang informatif yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, memanfaatkan dan menyebarkan informasi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi akan dapat terwujud.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis – Direktorat Jenderal SDPPI senantiasa mendukung program-program yang telah ditetapkan

melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Program kerja Balai Monitor Bandung secara umum diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder yang terkait melalui pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, sehingga dapat mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu LKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung pada Tahun 2018 dan berkontribusi positif terhadap meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;

5. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Dalam struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

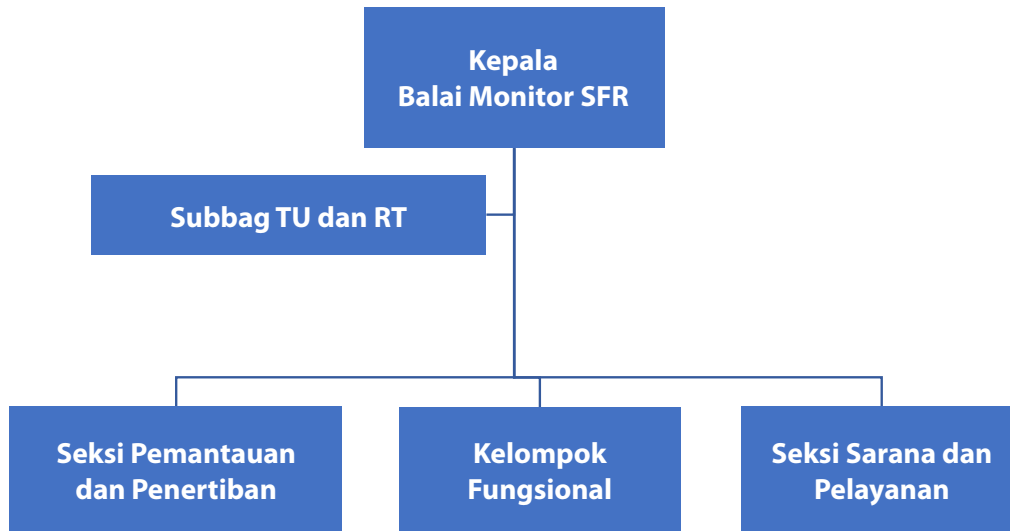
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

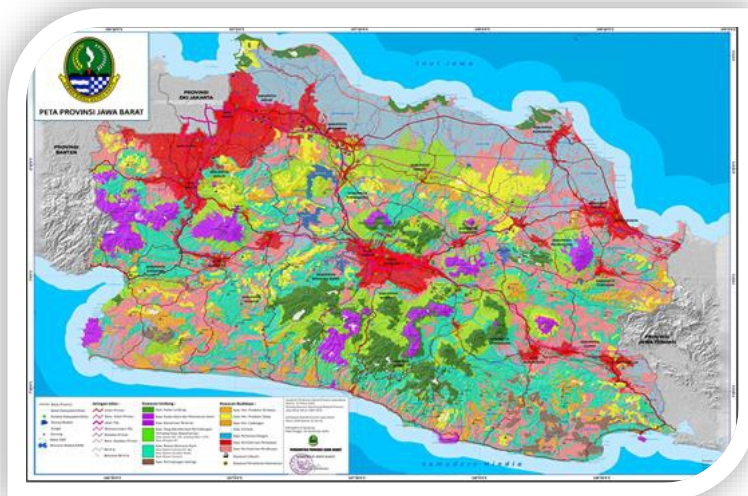
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Struktur Organisasi
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS



Provinsi Jawa Barat dibentuk pertamakali tanggal 14 Agustus 1926 berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui staatblad 1924 Nomor: 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) membagi kembali Daerah Negara Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa Barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten SuBandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka

didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 - 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 37.175,97 km². Jawa Barat juga memiliki 1.267 waduk/situ dengan potensi air permukaan lebih dari 10.000 juta m³. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th.

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100- 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 - 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,4 – 30,7°C dan kelembaban udara antara 73–84%. Data BMKG menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008, turun hujan selama 1-26 hari setiap bulannya dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.

Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi

pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menghargai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah Jawa Barat saat ini sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi. Dalam konteks pelayanan publik, inisiatif pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Hal itu juga didorong oleh kebijakan desentralisasi yang strategis untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik betul-betul dapat mendorong proses transparansi yang pada akhirnya akan tercipta system pelayanan yang efektif dan sekaligus efisien. Berikut adalah gambaran penyelenggara telekomunikasi berbasis spektrum frekuensi radio yang ada di wilayah Jawa Barat sebagai berikut.

Hal tersebut, memberikan sebuah potensi yang besar terhadap peningkatan jumlah pengguna frekuensi radio di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, sekaligus merupakan tantangan dan hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung serta skill sumber daya manusia yang mumpuni secara kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, wilayah tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berkurang menjadi 22 kabupaten/kota setelah Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor menjadi wilayah kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perangkat utama monitoring maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung saat ini masih kurang memadai jika dibanding dengan jumlah wilayah yang harus dipantau dan diawasi, mengingat masih ada beberapa perangkat yang sudah *out of date*, sehingga dibutuhkan pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.

2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang memiliki kompetensi teknis dan ahli dalam mengoperasikan perangkat cukup terbatas meskipun jumlah pengendali frekuensi cukup memadai tetapi skill yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) melalui pelatihan teknis berkelanjutan dan berkesinambungan.
3. Rendahnya anggaran biaya kegiatan pengembangan sumber daya manusia ASN terutama dalam penetrasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.
4. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, untuk itu diperlukan pembahasan lintas sektoral dan sosialisai intensif yang tepat sasaran dan tepat guna
5. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang membutuhkan intensitas pengawasan dan pengendalian tentunya hal tersebut dapat dilaksanakan jika perangkat dan SDM memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

B. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung meliputi:

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai peran dalam upaya optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga meningkatkan tertibnya para pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi yang harus tercipta sehingga masyarakat atau para pengguna telekomunikasi/pengguna frekuensi tidak saling mengganggu, tertib, lancar, aman dalam menggunakan alat/perangkat serta penggunaan spektrum frekuensi radio.

Sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas

VISI

Menjadikan Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkualitas dalam pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio, guna terwujudnya tertib dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi di wilayah Jawa Barat.

MISI

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian spectrum frekuensi radio diwilayah Jawa Barat.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman pengguna spectrum frekuensi radio kepada masyarakat luas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meminimalisir tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang spectrum frekuensi radio.

4. Mengantisipasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional sehingga layak pakai dan sesuai perkembangan teknologi.

KEBIJAKAN MUTU

Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berkomitmen untuk mengembangkan system informasi yang efektif dengan mengoptimalkan penggunaan perangkat dan memutakhirkan data, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal guna mencapai tingkat kepuasan pelanggan, sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategis, konsisten menerapkan dan melaksanakan system manajemen mutu ISO 9001:2015, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran, target dan program mutu, patuh terhadap semua peraturan, perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

B. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program dari Perejanjian Kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio.*

Untuk mengukur kinerja tujuan pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2018, yaitu:

- a. Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor
- b. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR
- c. Persentase (%) jumlah aduan/ klaim yang diselesaikan
- d. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT
- e. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR
- f. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT
- g. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT
- h. Persentase (%) terlaksananya UNAR

2. *Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.*

Untuk mengukur kinerja tujuan kedua ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2018, yaitu:

- a. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio;
- b. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%
		1. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		2. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%
		3. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		4. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.500.949.000,- (*empat belas miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.144.117.000,- (*tujuh miliar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah*) dan PNBP sebesar Rp. 7.356.832.000,- (*tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

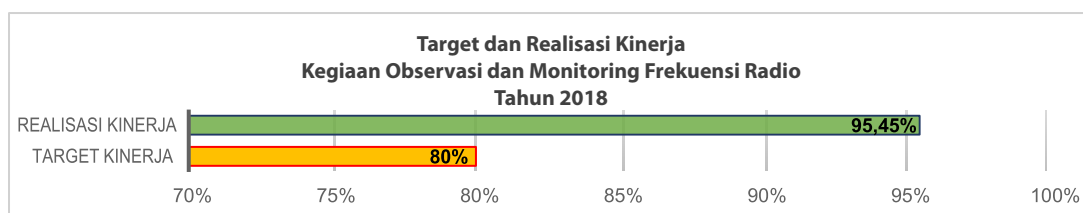
Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor.	80%	95,45%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR.	35%	41,35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100,00%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT.	85%	100,00%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	99,02%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT.	83%	108.63%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT .	100%	100,00%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR.	100%	100,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100%	100,00%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%	100,00%

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

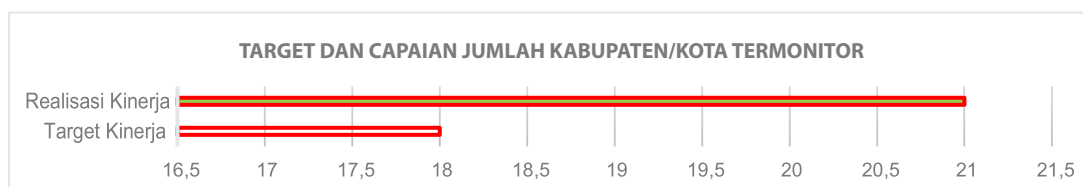
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor

Kegiatan observasi dan monitoring pengguna frekuensi radio bertujuan untuk memonitor penggunaan frekuensi radio. Cakupan kegiatan observasi dan monitoring ini adalah observasi dan monitoring semua pengguna frekuensi radio baik radio siaran, radio amatir, radio konsesi, televisi siaran, dan seluler yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) subservice range frekuensi radio. Target indikator kinerja **Kabupaten/kota yang dapat dimonitor** adalah 80% kabupaten/kota dapat dimonitor. Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 13 (tiga belas) kali kegiatan untuk 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten. Dari 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten tersebut termonitor 21 Wilayah kabupaten/kota termonitor. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



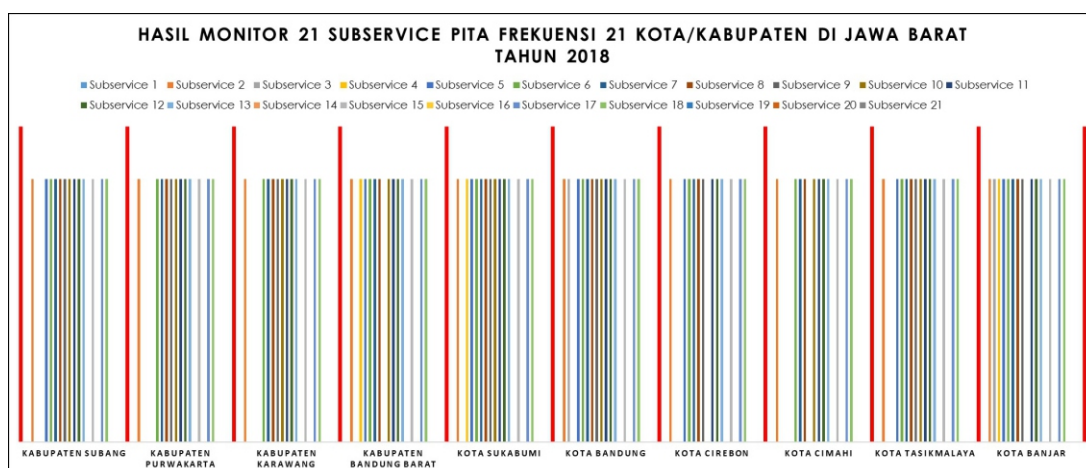
Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2018)

Dari jumlah target monitor yang harus dilaksanakan sebanyak 80% kabupaten/kota atau sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota, termonitor 95.45% kabupaten/kota atau sebanyak 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat.



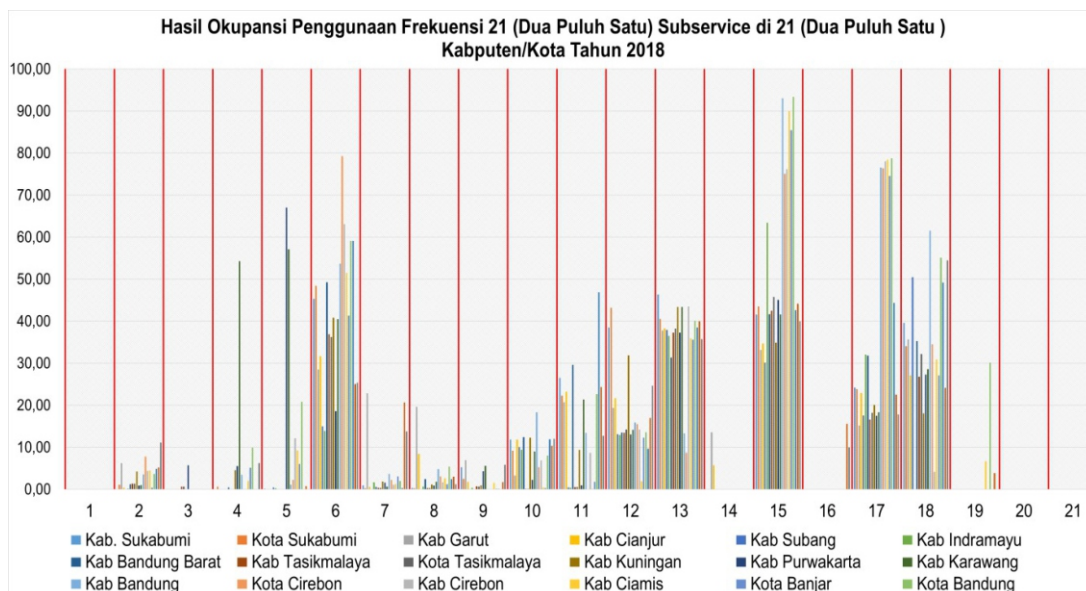
Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2018)

Hasil observasi dan Monitoring 21 subservice pita frekuensi di 21 kota/kabupaten adalah sebagai berikut:



Berdasarkan hasil monitor diperoleh bahwa subservice yang tidak termonitor adanya penggunaan frekuensi adalah subservice 1 berupa Subservice Maritim dan Marabahaya, subservice 3 berupa subservice Marabahaya, subservice 16 dan 17 berupa potensi broadband 1400 MHz dan 1900 MHz, subservice 19 berupa broadband dan siaran satelit, subservice 20 berupa Seluler BWA, dan subservice Potensi Broadband 5 Ghz.

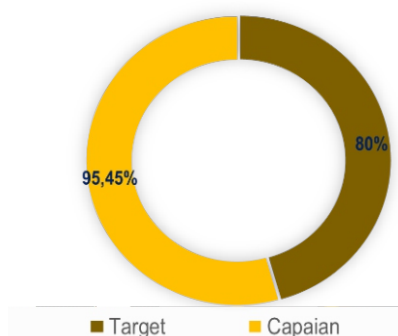
Kemudian, hasil okupansi penggunaan frekuensi radio 21 (dua puluh satu) subservice di 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota menunjukkan bahwa rata-rata okupansi penggunaan frekuensi radio 13,89% dengan detail adalah sebagai berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 21 (dua puluh satu) subservice tingkat okupansi yang paling tinggi terdapat pada subservice 15 berupa Seluler 1800 MHz, subservice 6 berupa Radio Siaran FM, subservice 17 berupa Seluler 2100 MHz, subservice 18 berupa BWA 2.3 GHz, subservice 13 berupa Seluler 900 MHz, subservice 12 berupa trunking dan seluler 800 MHz, dan subservice 11 berupa televisi siaran UHF. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendudukan subservice frekuensi radio yang paling tinggi di wilayah Jawa Barat adalah subservice frekuensi seluler dan broadcast. Hal ini sangat wajar karena pada saat ini tingkat penetrasi masyarakat terhadap penggunaan akses data dan informasi melalui jaringan seluler sangat tinggi terutama pengguna-pengguna akses data dan informasi berbasis cellphone (telepon seluler).

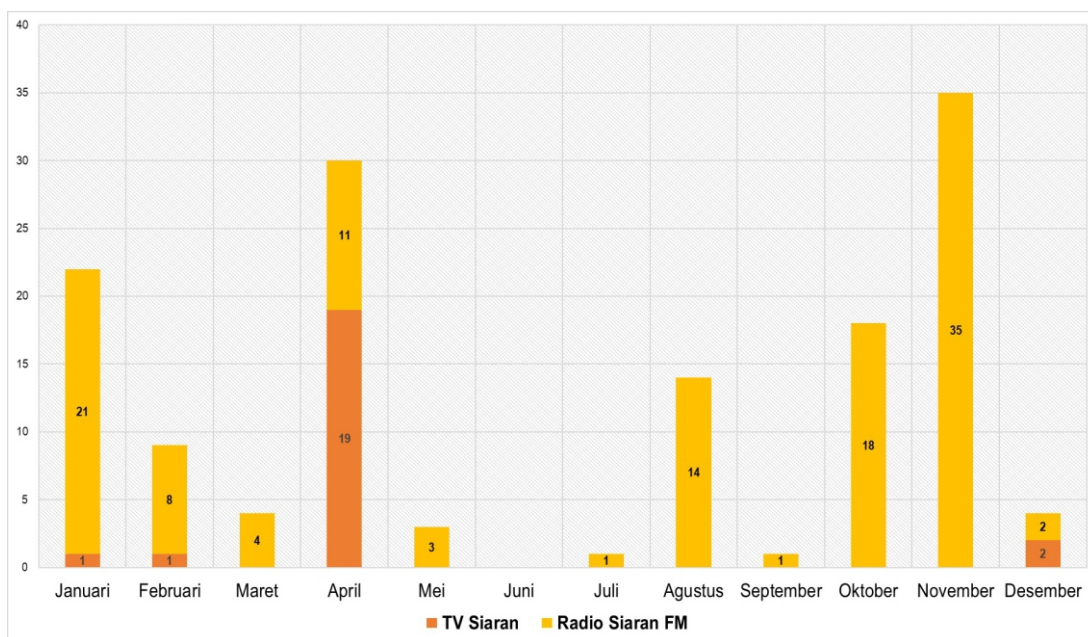
Target dan Capaian Monitoring Frekuensi Radio Tahun 2018



Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja *"Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor"* dari target 80% kabupaten/kota dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 21 (dua puluh satu) dengan persentase sebesar 95,45%. Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 119,31 %

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR

Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Selama tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) stasiun dari target 341 (tiga ratus empat puluh satu) stasiun yang memiliki ISR atau sebesar 41,35%. Data sebaran hasil pengukuran Radio Siaran FM dan TV Siaran Analog tahun 2018 per bulan adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2018)

Pengukuran terhadap TV Siaran Analog dan Radio Siaran FM di tahun 2018 yang dilakukan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menunjukkan bahwa jumlah hasil pengukuran terhadap radio siaran sebanyak 118 (seratus delapan belas) stasiun radio siaran dan 23 (dua puluh tiga) stasiun televisi siaran. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat TV Siaran dan Radio Siaran yang belum dilakukan pengukuran dari total target 341 (tiga ratus empat puluh) TV Siaran Analog dan Radio Siaran FM yang baru dapat dilakukan pengukuran hanya 141 (seratus empat puluh satu) sehingga masih terdapat sekitar 200 (dua ratus) TV Siaran Analog dan Radio Siaran FM yang belum dilakukan pengukuran. Secara detil capaian pengukuran yang telah dilakukan dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

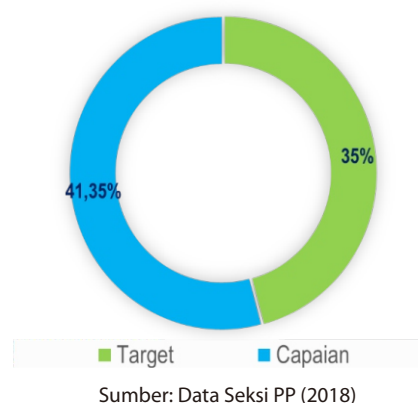
Tabel Hasil Pengukuran TV dan Radio Siaran Tahun 2018

Pengukuran Bulan	Stasiun TV Siaran	Stasiun Radio Siaran FM	Total
JANUARI	1	21	22
FEBRUARI	1	8	9
MARET	-	4	4
APRIL	19	11	30
MEI	-	3	3
JUNI	-	-	-
JULI	-	1	1
AGUSTUS	-	14	14
SEPTEMBER	-	1	1
OKTOBER	-	18	18
NOVEMBER	-	35	35
DESEMBER	2	2	4
TOTAL	23	118	141

Berdasarkan diagram dan tabel tersebut di atas capaian kinerja penggunaan frekuensi Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dengan jumlah Total 141 pengguna.

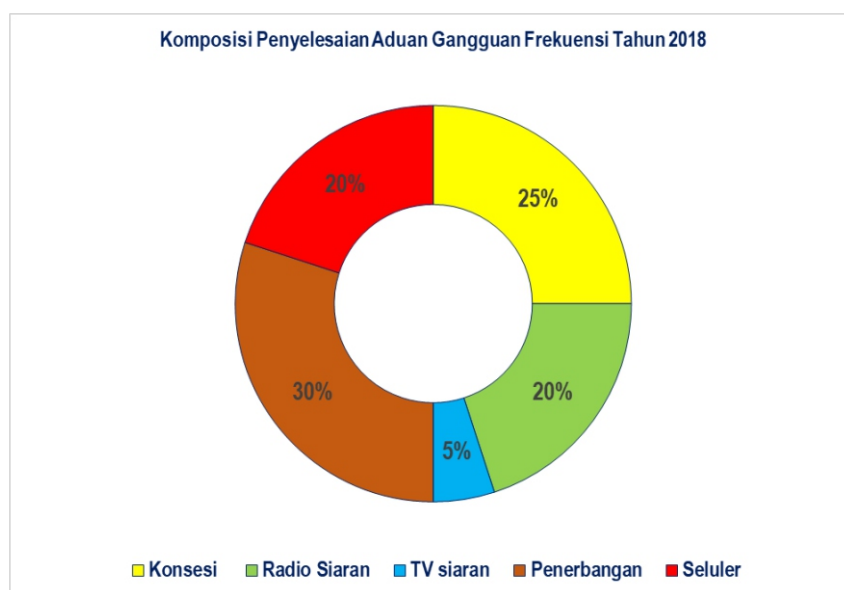
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, pada indikator "Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR" dengan Persentase capaian kinerja sebesar 118,14%.

Target dan Capaian Pengukuran TV dan Radio Siaran Tahun 2018



3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan

Penggunaan frekuensi radio oleh suatu pengguna frekuensi tertentu sangat rentan terhadap gangguan yang berasal dari pengguna yang lainnya baik berasal dari pengguna legal maupun ilegal sehingga diperlukan adanya kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio. Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio bertujuan melaksanakan penanganan gangguan atas dasar pengaduan/klaim dari pengguna frekuensi radio dan/atau masyarakat di wilayah Jawa Barat. Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini bertujuan untuk menangani setiap gangguan yang dialami oleh pengguna frekuensi radio. Indikator Kinerja; **Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan** memiliki target realisasi sebesar 94 %. Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mendapat aduan/klaim gangguan penggunaan frekuensi radio dari masyarakat pengguna frekuensi sejumlah 20 (dua puluh) aduan dan dari semua pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio tersebut telah tertangani dengan hasil clear Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2018 adalah:



Sumber: Data Seksi PP (2018)

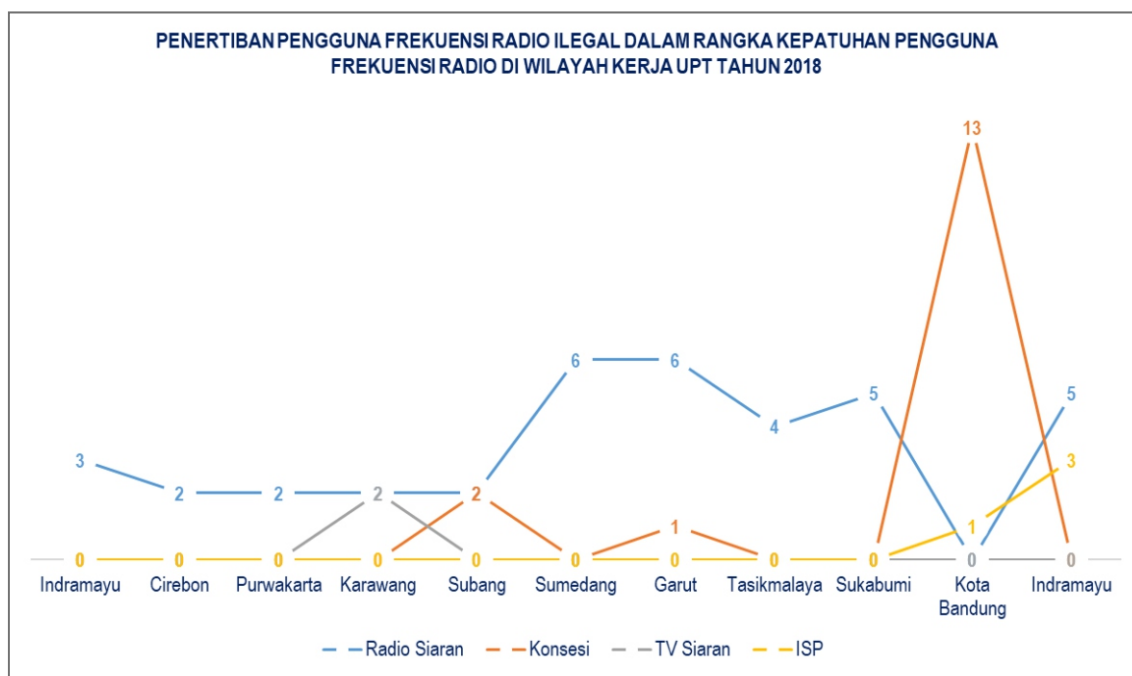
Berdasarkan gambar di atas komposisi aduan gangguan tertinggi adalah gangguan frekuensi penerbangan dan gangguan frekuensi koneksi. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah gangguan frekuensi terhadap frekuensi penerbangan merupakan prioritas yang menjadi perhatian khusus karena frekuensi penerbangan menyangkut keselamatan jiwa manusia. Secara umum gangguan berasal dari pengguna frekuensi yang ada di bawahnya yaitu range frekuensi radio siaran dari 87,7 MHz – 108 MHz yang mengalami spurious terhadap frekuensi penerbangan 108 MHz – 137 MHz. Detil dari komposisi gangguan yang ditangani di tahun 2018 adalah:

Kategori	Konsesi	Radio Siaran	TV siaran	Penerbangan	Seluler	Jumlah
Jumlah	5	4	1	6	4	20
Persentase	25%	20%	5%	30%	20%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator **"Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan"** dari target 94% tercapai 100% aduan gangguan frekuensi radio yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah ditangani semua dengan hasil *clear*. Terlihat bahwa capaian kinerja dengan persentase sebesar 106.38 %.

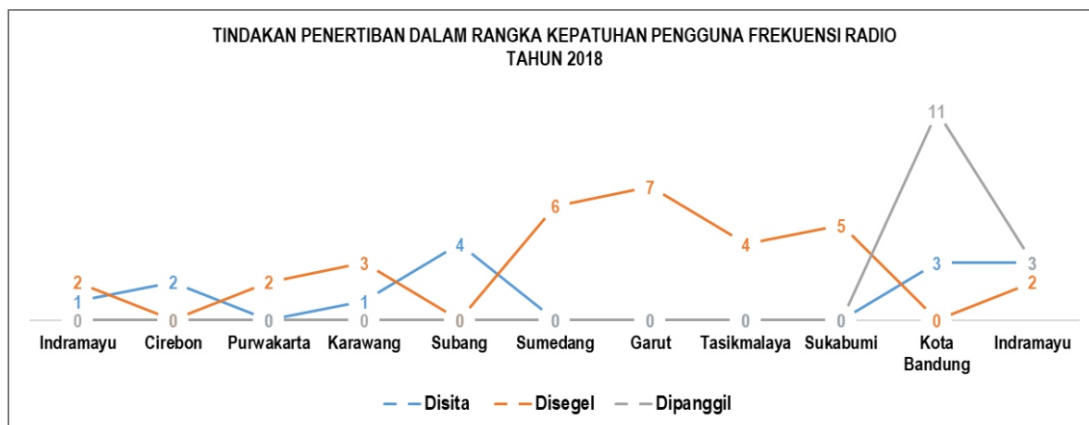
4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target 85%, Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sejumlah 15 (lima belas) kali kegiatan penertiban di wilayah Jawa Barat dari kegiatan tersebut terdapat hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti melalui kegiatan tindak lanjut hasil penertiban. Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama tahun 2018 adalah 100% dari target 85%. Komposisi pelaksanaan kegiatan penertiban tersebut adalah sebagai berikut:



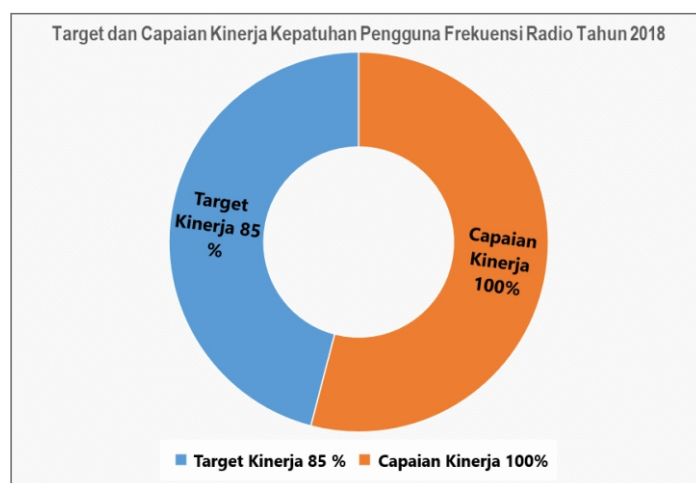
Sumber: Data Seksi PP (2018)

Tindakan penertiban pengguna frekuensi ilegal di atas menunjukkan bahwa pengguna ilegal terbesar secara umum adalah pengguna frekuensi radio siaran FM dan pengguna radio konsesi. Hampir di setiap lokasi kegiatan penertiban dalam rangka kepatuhan pengguna frekuensi radio, pengguna frekuensi radio siaran jumlahnya mendominasi kecuali pada wilayah penertiban yang dilakukan di Kota Bandung didominasi oleh pengguna frekuensi radio konsesi. Tindakan yang dilakukan dalam rangka kepatuhan penggunaan frekuensi radio dari penertiban di atas adalah:



Sumber: Data Seksi PP (2018)

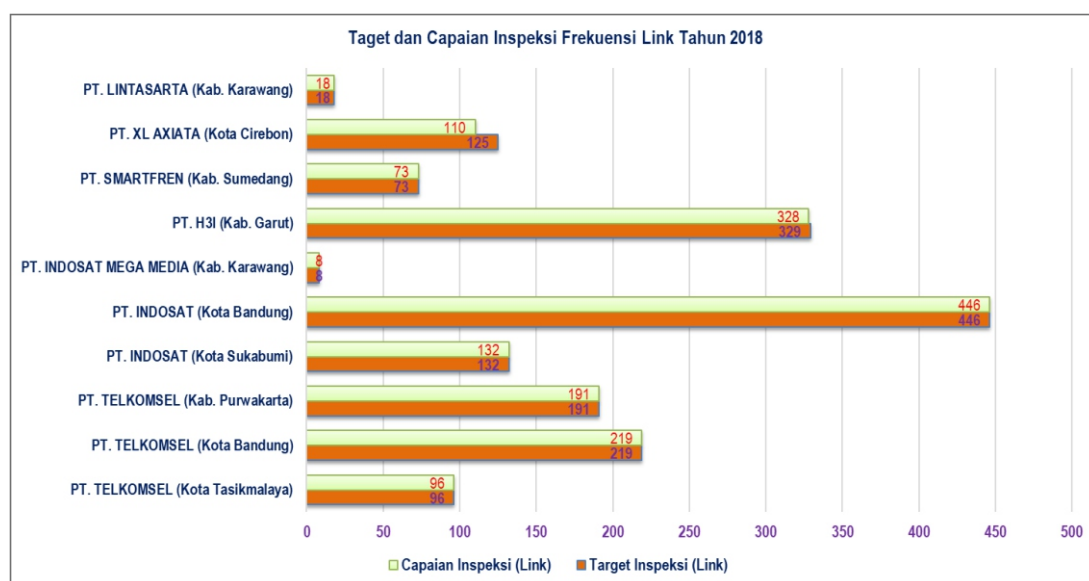
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kepatuhan pengguna frekuensi radio ilegal adalah dengan dipanggil untuk diberikan pembinaan bahwa penggunaan frekuensi harus berizin dan para penanggung jawab operasional pengguna frekuensi ilegal membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan operasional penggunaan frekuensi sebelum memperoleh izin.



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT, dengan persentase capaian kinerja sebesar : 117.65%

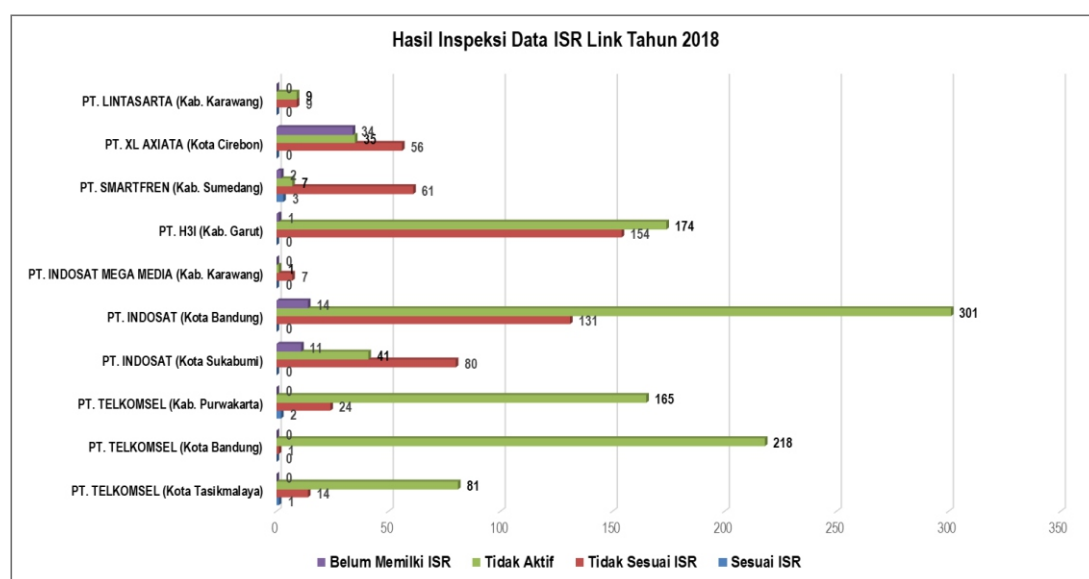
5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 81%, selama tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan inspeksi data fekuensi radio dengan 9 (sembilan) kali kegiatan di wilayah Jawa Barat dengan hasil yang diperoleh sejumlah 1621 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) data dari 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) jumlah data sample yang ditargetkan pada tahun 2018. Rincian target dan capaian kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR tahun 2018 adalah:



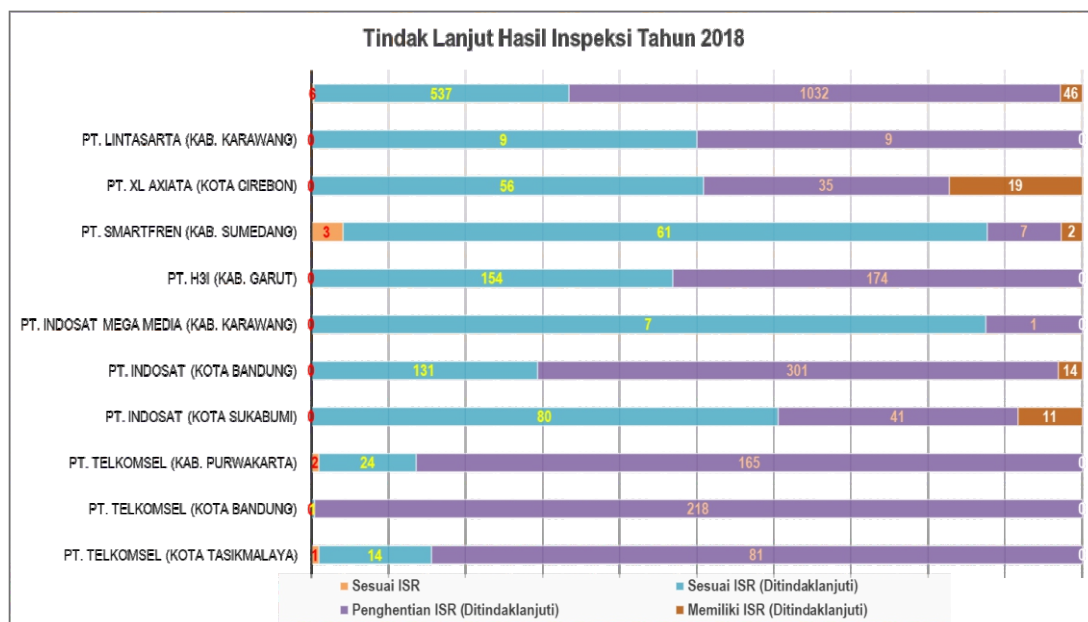
Sumber: Data Seksi PP (2018)

Hasil kegiatan inspeksi 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) jumlah data sample adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2018)

Berdasarkan hasil inspeksi tersebut kemudian ditindaklanjuti, tindak lanjut atas kegiatan inspeksi yang dilakukan terhadap 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) jumlah data sample adalah sebagai berikut:



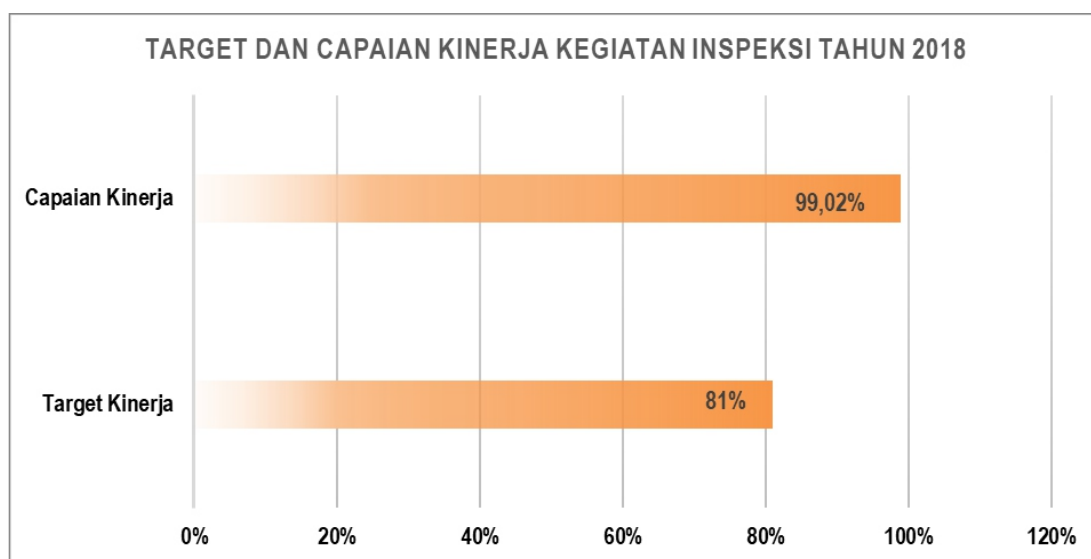
Sumber: Data Seksi PP (2018)

Secara detil kegiatan inspeksi data frekuensi radio link operator seluler tahun 2018 diringkas dalam tabel resume kegiatan inspeksi dan tindak lanjut data ISR tahun 2018, di bawah ini:

Data SIMS	Data Sampling	Data Hasil Inspeksi				Tindakanjutr Hasil Inspeksi		Capaian (%Valid)
		ISR Aktif		Stasiun Tidak Aktif	Proses ISR	Sudah Ditindakanjutr	Belum Ditindakanjutr	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
1637	1637	6	537	1032	46	1615	0	99,02

Sumber: Data Seksi PP (2018)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi data frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sejumlah 9 (sembilan) kali kegiatan dengan hasil 1621 (satu ribu enam ratus dua puluh satu) radio link terdiri dari 6 (enam) link sesuai ISR, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) link tidak sesuai ISR, 1032 (seribu tiga puluh dua) link tidak aktif, dan 46 (empat puluh enam) link dalam proses perizinan ISR. Dari 1621 (satu ribu enam ratus dua puluh satu) hasil inspeksi tersebut 1615 (seribu enam ratus lima belas) sudah tindaklanjuti, sehingga jumlah hasil inspeksi adalah 1621 (satu ribu enam ratus dua puluh satu) dari target sampel sebanyak 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) ISR link atau sebesar 99.02%.



Sumber: Data Seksi PP (2018)

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa sepanjang 2018, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” dengan persentase capaian kinerja sebesar 122.25%.

6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2018 sebesar 90.16% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 108.63%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	90.16%	108.63%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur sebagai berikut :

Triwulan	Kondisi Perangkat			Jumlah Perangkat	Persen (%) Berfungsi
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
Januari - Maret	397	23	17	437	90.85
April - Juni	394	25	18	437	90.16
Juli - September	390	26	21	437	89.24
Oktober - Desember	394	21	22	437	90.16

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT” dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,63%

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio

No	Bulan	Baru	Perpanjangan	ST-1	ST-2	ST-3	ST-Terakhir	Total
1	Januari	16	119	11	3	5	1	155
2	Februari	2	76	14	6	3	2	103
3	Maret	0	76	7	6	3	0	92
4	April	1	30	8	0	2	0	41
5	Mei	1	73	5	1	1	1	82
6	Juni	2	58	6	5	3	0	74
7	Juli	3	56	11	1	4	1	76
8	Agustus	1	57	8	4	0	1	71
9	September	1	26	2	2	3	0	34
10	Oktober	14	78	11	1	3	0	107
11	November	3	48	4	5	1	0	61
12	Desember	2	68	8	1	0	1	80
	TOTAL	46	765	95	35	28	7	976

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP, ST dan ISR oleh UPT di wilayah Jawa Barat semuanya telah terdistribusi, sehingga capaian kinerja, indikator "Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT" adalah sebesar 100%.

8. IK-7 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%.

Berikut ini merupakan indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Rincian capaian indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan UNAR di Jawa Barat

No	Tanggal Ujian	Lokasi Ujian	Jumlah Peserta			Lulus			Tidak Lulus		
			YD	YC	YB	YD	YC	YB	YD	YC	YB
1	22-Apr-18	Garut	267	0	0	229	0	0	38	0	0
2	28-Oct-18	Bandung	556	70	21	439	64	21	117	6	0

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2018, capaian indikator "Persentase (%) Pelaksanaan UNAR" adalah sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 2: TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melakukan kegiatan berupa :

- (1) Kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio
- (2) Kegiatan layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Indikator Kinerja Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan data yang

dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan hasil kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebagai berikut :

KPKNL	WAJIB BAYAR
Bandung	42
Bogor	22
Cirebon	23
Purwakarta	14
Tasikmalaya	29
TOTAL	130

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio hingga akhir Desember 2018 adalah sebesar 100%..

2. IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100% Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan di tahun 2018 sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Jawa Barat yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, maka dibutuhkan layanan administrasi untuk mencapai target yang telah direncanakan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan layanan administrasi yang terdiri dari:

- a. Perencanaan dan program
- b. Pengelolaan Akuntansi Pemerintahan
- c. Kepegawaian dan Kearsipan
- d. Penatausahaan Rumah Tangga Kantor

a. Perencanaan dan Program

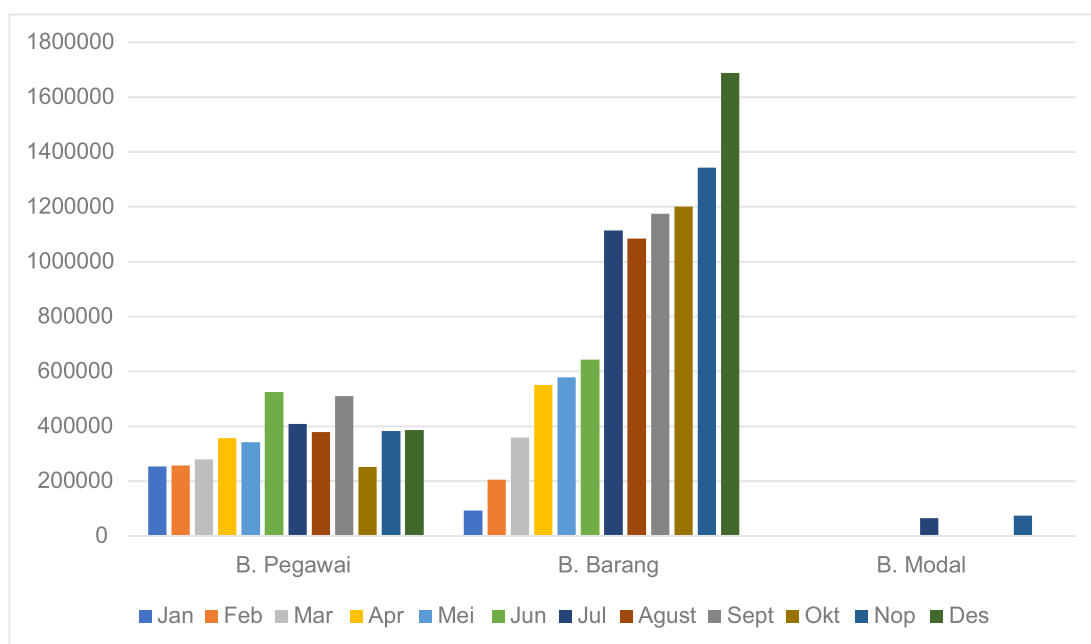
Pada tahun 2018 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebesar Rp. 14.500.949.000,- (empat belas milyar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah:

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	3053.006	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balai Monitor Kelas I Bandung, terdiri dari :	49 Kegiatan	Rp.1.304.795.000,-
		1. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	3 Kegiatan	Rp.14.670.000,-
		2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp.239.900.000,-
		3. Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.25.300.000,-
		4. Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp.377.500.000,-
		5. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	2 Kegiatan	Rp.8.380.000,-
		6. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	7 Kegiatan	Rp.194.600.000,-
		7. Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	4 Kegiatan	Rp.16.424.000,-
		8. Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp.235.700.000,-
		9. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.16.035.000,-
		10. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Kegiatan	Rp.28.860.000,-
		11. Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp.62.168.000,-
		12. Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Kegiatan	Rp.85.258.000,-
2	3053.043	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balai Monitor Kelas I Bandung, terdiri dari :	18 Kegiatan	Rp.348.955.000,-
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	5 Kegiatan	Rp.20.250.000,-
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	13 Kegiatan	Rp.328.705.000,-

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
3	3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari:	1 Layanan	Rp.3.946.148.000,-
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp.1.134.000.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp.1.028.210.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran		Rp.392.616.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp.1.391.322.000,-
4.	3053.951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp.139.550.000,-
		1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp. 64.525.000,-
		2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp. 75.025.000,-
5.	3053.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp.8.761.501.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp.4.329.799.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp.4.431.702.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2018 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menetapkan rencana penggunaan anggaran (disbursement plan).

Grafik Rencana Penarikan Anggaran Tahun 2018



b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan jajaran Pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten Jawa Barat, serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Jasa Pengamanan Kantor	1 paket	01.2/994.52/BALAI MONITOR.32/PL.02.02/01/2018	1.311.845.219,-
2	Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	02.2/994.52/BALAI MONITOR.32/PL.02.02/05/2018	357.712.171,-
3	Sewa Tanah Slave SPFR di Kota Cirebon	1 paket	03/994.52/BALAI MONITOR.32/PL.02.02/01/2018	90.000.000,-
4	Peningkatan Kemampuan SDM Balai Monitor SFR Klas I Bandung	36 org	06/078.52/BALAI MONITOR.32/KU.01.04/03/2018	193.328.630,-
5	Pekerjaan Pemeliharaan 2 Unit dan Gedung Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	1 Paket	08/994.52/BALAI MONITOR.32/KU.01.04/04/2018	62.360.364,-

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
6	Medical Check Up	36 orang	09/078.52/BALAI MONITOR.32/ KU.01.04/05/2018	72.000.000,-
7	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	1 paket	10/994.52/BALAI MONITOR.32/ KU.01.04/08/2018	116.527.000,-
8	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dan Area Pagar Kantor	1 paket	R-546/Kominfo/ Balai Monitor.52/PL.02.02/05/ 2018	78.977.000,-
9	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	1 paket	12/951.53/BALAI MONITOR.32/ KU.01.04/10/2018	71.781.402,-
10	Pemeliharaan Tower	1 paket	13/078.52/BALAI MONITOR.32/ KU.01.04/10/2018	119.966.000,-
11	Pekerjaan Pemeliharaan 3 Unit Rumah Negara dan 4 Unit Gedung Kantor Slave Balai Monitor	1 paket	14/994.52/BALAI MONITOR.32/ KU.01.04/11/2018	138.524.298,-

DAFTAR BMN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Elevator /Lift	Unit	1	1	
Portable Generating Set	Unit	1	1	
Stationary Generating Set	Unit	1	1	
Stationary Water Pump	Unit	5	5	
Pompa Air	Unit	4	4	
Mini Bus (penumpang 14 orng kebawah)	Unit	5	5	
Sepeda Motor	Unit	2	2	
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	3	3	
Baggage Trolly	Unit	2	2	
Mesin Kompresor	Unit	1	1	
Battery Charge	Unit	25	25	
Dongkrak Mekanik	Unit	2	2	
Transistor Tester AVO	Unit	1	1	
Spektrum Analyzer	Unit	5	5	
SWR Meter	Unit	2	2	
Frequency Cuonter	Unit	8	8	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Global Positioning System	Unit	5	5	
Field Strength Meter	Unit	2	2	
Oscilloscope Main Frame With Variable Persistence Storage Tube	Unit	1	1	
Scanner (Universal Tester)	Unit	1	1	
Tool Set	Unit	2	2	
Altimeter	Unit	1	1	
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Unit	2	2	
Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Unit	1	1	
Mesin Penghitung Uang	Unit	1	1	
Lemari Besi/Metal	Unit	49	49	
Lemari Kayu	Unit	16	16	
Rak Besi	Unit	9	9	
Filing Cabinet Besi	Unit	26	26	
Brankas	Unit	3	3	
Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Unit	1	1	
Tabung Pemadam Api	Unit	20	20	
CCTV - Camera Control Television System	Unit	25	25	
Mesin Absensi	Unit	1	1	
Penangkal Petir	Unit	5	5	
LCD Projector/Infocus	Unit	5	5	
Panic Button System, Alarm Indicator	Unit	10	10	
Meja Kerja Besi/Metal	Unit	7	7	
Meja Kerja Kayu	Unit	49	49	
Kursi Besi/Metal	Unit	115	115	
Sice	Unit	24	24	
Bangku Panjang Kayu	Unit	6	6	
Meja Rapat	Unit	5	5	
Meja Komputer	Unit	2	2	
Meja Ketik	Unit	2	2	
Meja Resepsionis	Unit	2	2	
Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	84	84	
Pot Bunga	Unit	2	2	
Partisi	Unit	1	1	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Nakas	Unit	11	11	
Workstation	Unit	10	10	
Jam Elektronik	Unit	14	14	
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	4	4	
Mesin Pemotong Rumput	Unit	7	7	
Lemari Es	Unit	2	2	
A.C. Sentral	Unit	30	30	
A.C. Split	Unit	19	19	
Exhaust Fan	Unit	4	4	
Kompas Gas (Alat Dapur)	Unit	1	1	
Tabung Gas	Unit	1	1	
Mixer	Unit	1	1	
Televisi	Unit	19	19	
Amplifier	Unit	2	2	
Loudspeaker	Unit	2	2	
Sound System	Unit	2	2	
Wireless	Unit	4	4	
Unit Power Supply	Unit	5	5	
Stabilisator	Unit	1	1	
Camera Video	Unit	4	4	
Tiang Bendera	Unit	1	1	
Tangga Aluminium	Unit	4	4	
Dispenser	Unit	6	6	
Handy Cam	Unit	1	1	
Karpet	Unit	4	4	
Gordyn/Kray	Unit	55	55	
Kabel Roll	Unit	1	1	
Keset Kaki	Unit	3	3	
Kabel	Unit	24	24	
Tangki Air	Unit	2	2	
Microphone/Wireless MIC	Unit	1	1	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	11	11	
DC Converter	Unit	1	1	
Layar Film/Projector	Unit	1	1	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Camera Digital	Unit	7	7	
LCD Monitor	Unit	1	1	
Connectors	Unit	5	5	
Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Unit	2	2	
Teropong/Keker	Unit	2	2	
GPS Receiver	Unit	3	3	
Telephone (PABX)	Unit	5	5	
Pesawat Telephone	Unit	26	26	
Handy Talky (HT)	Unit	7	7	
Facsimile	Unit	2	2	
Unit Tranceiver HF Stationery	Unit	2	2	
Unit Tranceiver VHF Portable	Unit	16	16	
Unit Tranceiver VHF Transportable	Unit	3	3	
Unit Tranceiver VHF Stationary	Unit	9	9	
Radio Link	Unit	6	6	
Alat Spektrum Frek Monitor UHF	Unit	1	1	
Spectrum Analyzer Portable for Field Use	Unit	1	1	
Peralatan Antena VHF/FM Lainnya	Unit	2	2	
Peralatan Antena UHF Lainnya	Unit	4	4	
Antena All Band	Unit	2	2	
Tower	Unit	2	2	
Lightning Protector	Unit	9	9	
Coaxial Feeder	Unit	3	3	
All Band Receiver	Unit	9	9	
Peralatan Antena Penerima MF+HF	Unit	4	4	
Peralatan Antena Penerima VHF	Unit	3	3	
Peralatan Antena Penerima UHF	Unit	3	3	
Peralatan Antena Penerima SSHF	Unit	1	1	
Radio Direction Finder	Unit	5	5	
Unit Antena Transceiver VHF Stationary	Unit	4	4	
Unit Antena Transceiver SHF Portable	Unit	6	6	
Genset	Unit	3	3	
P.C Unit	Unit	46	46	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Lap Top	Unit	25	25	
Note Book	Unit	6	6	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	16	16	
Server	Unit	3	3	
Router	Unit	7	7	
Wireless Access Point	Unit	14	14	
Fire Alarm System	Unit	1	1	
Monografi	Unit	128	128	
Lisensi	Unit	1	1	

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Balai Monitor SFR Kelas I Bandung, didukung sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan tugas-tugas dimaksud antara lain :

1. Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Bandung

Balai Monitor Kelas I Bandung terletak di: Jl. Pacuan Kuda no. 146, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung Jawa Barat. Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Bandung.



2. Stasiun Monitoring Master

Stasiun Monitoring Master terletak di Jl. Purbasari No.1 RT.06/RW 11, Sukamiskin. Arcamanik, Bandung Jawa Barat.



3. Stasiun Slave Cigondewah

Stasiun slave Cigondewah terletak di Jl. Cigondewah Hilir RT.01 / RW.09 Margaasih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.



4. Stasiun Slave Cileunyi

Stasiun slave Cileunyi terletak di Kampung Tanjakan Muncang Rt.04/Rw.06, Cileunyi Wetan, Cileunyi Kabupaten Bandung.



5. Stasiun Slave Lembang

Stasiun slave Lembang terletak di Kampung Sindang Wangi RT.01 RW.09, Lembang Kabupaten Bandung Barat.



6. Shelter Cirebon

Shelter Cirebon terletak di JL. Benda Kondangsari RT.17 RW.06, Beber kabupaten Cirebon.



7. Rumah Dinas

Balai Monitor Kelas I Bandung memiliki 4 (empat) buah rumah dinas yang terletak di Jl. Purbasari Indah no. 23-29 Rt.06 / Rw.01, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung.



c. Kepegawaian

Pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki sumber daya manusia sejumlah 36 (tiga puluh enam) pegawai negeri sipil (PNS) dan 2 (dua) pegawai PPNP serta 34 (tiga puluh empat) pegawai outsourcing

• Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 16 (enam belas) pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Bandung yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 7 (tujuh) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balai Monitor Kelas I Bandung

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	TMT	MASA KERJA
1.	Agus Gustaji Garnita,S.Sos, M.Kom NIP. 196 701071989031003	Pembina / IV.a	1 Maret 2018	29 Tahun
2.	Sular, SH, MSi NIP. 196610081989031001	Penata Tk.1 / III.d	1 Maret 2018	29 Tahun
3.	Ahmad Fadilah NIP. 1964080301985031002	Penata Tk.1 / III.d	1 Maret 2018	33 Tahun
4.	Hendi Herdiana, ST,MT NIP. 197808012000031002	Penata Tk.1 / III.d	1 Maret 2018	18 Tahun
5.	Dyah Pravitasari, ST NIP. 198202192006042002	Penata / III.c	1 April 2018	11 Tahun 11 Bulan
6.	Uus Ruswandi NIP. 196507161986031004	Penata Muda Tk.1 / III.b	1 Maret 2018	32 Tahun
7.	Ludi Jamal Awaludin NIP. 198402272003121006	Penata Muda Tk.1 / III.b	1 Maret 2018	14 Tahun 4 Bulan
8.	Wiratno NIP. 198706182014031003	Penata Muda Tk.1 / III.b	1 Maret 2018	4 Tahun
9.	Gugun Guniarsa NIP. 197510242006041006	Penata Muda / III.a	1 Januari 2018	11 Tahun 11 Bulan
10.	Sigit Nuryanto NIP. 198306092008031001	Penata Muda / III.a	1 Maret 2018	10 Tahun
11.	Arief Widagdo NIP. 198205012009121002	Penata Muda / III.a	1 Januari 2018	8 Tahun 4 Bulan
12.	Ade Iskandar NIP. 196203072007011002	Pengatur Muda Tk.1/II.b	1 April 2018	11 Tahun 3 Bulan
13.	Budiana NIP. 196311292008121002	Pengatur Muda Tk.1/II.b	1 Maret 2018	9 Tahun 4 Bulan
14.	Trisno Budiman NIP. 196911122008121002	Pengatur Muda Tk.1/II.b	1 Maret 2018	9 Tahun 4 Bulan
15.	Jana NIP. 197202212008121001	Juru Tk.1 / I.d	1 April 2018	9 Tahun 4 Bulan
16.	Asep Atang Rusyana NIP. 196808072008121002	Juru Tk.1 / I.d	1 Maret 2018	9 Tahun 4 Bulan

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balai Monitor Kelas I Bandung

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	SIDIQ PURNOMO NIP. 198011122005021002	KP GOL (III/B) ke (III/c)	1 April 2018	13 TH 02 BLN
2	WIRATNO NIP. 198706182014031003	KP GOL (III/b) ke (III/c)	1 April 2018	4 TH 01 BLN
3	ARIEF WIDAGDO. NIP. 198205012009121002	KP GOL (II/d) ke (III/a)	1 April 2018	8 TH 4 BLN
4	HENDI HERDIANA NIP. 197808012000031002	KP GOL (III/d) ke (IV/a)	1 Oktober 2018	18 TH 07 BLN
5	LUDI JAMAL AWALUDDIN NIP. 198402272003121006	KP GOL (III/b) ke (III/c)	1 Oktober 2018	14 TH 10 BLN
6	ADE ISKANDAR. NIP. 196203072007011002	KP GOL (II/b) ke (II/c)	1 Oktober 2018	11 TH 09 BLN
7	JANA NIP. 197202212008121001	KP GOL (I/d) ke (II/a)	1 Oktober 2018	9 TH 10 BLN

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2018

TAHUN	USIA			
2018	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	15	8	13	0

- Pejabat Pengendali**

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor SFR Kelas I Bandung

NO.	FUNGSIONAL	2018
1	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	2
3	Pengendali Frekuensi Ahli Pertama	2
4	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	3
5	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan	2
6	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana	2
Jumlah		12

• **PPNS**

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	HARI PRASETYO NIP. 196101181987031002	Pembina Tk.1 / IV.b	Kepala Balai Monitor
2	DRADJANTI DIAN ARIYATI NIP. 196204161989032002	Penata Tk.1 / III.d	Kasubbag TU/RUTA
3	REKAN KARYONO NIP. 196311051989031001	Penata Tk.1 / III.d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
4	RUDI HERAWAN NIP. 196502141986031003	Penata Tk. I / III.d	Penyidik PNS
5	UTANG SETYA ERAWAN NIP. 196308131989031004	Penata / III/c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia
6	SIDIQ PURNOMO NIP. 198011122005021002	Penata / III/c	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan
7	ASEP WIRAHMAN NIP. 197307172005021002	Penata Muda TK. I / III/b	Penyidik PNS

• **Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat, bimtek, dan workshop, serta mengadakan acara pembinaan mental dan disiplin pegawai yang diadakan di Makassar pada tanggal 12-14 April 2018. Dari peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan agar setiap pegawai memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam rangka menunjang tugas kedinasannya.

d. Pelaksanaan Anggaran

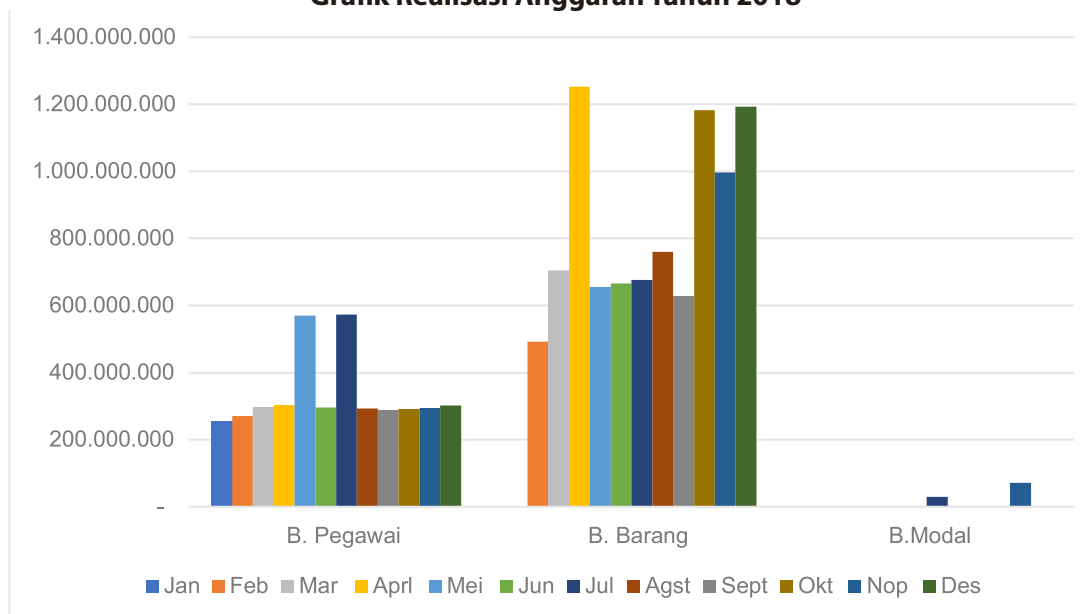
Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tahun anggaran 2018 sesuai DIPA No. 059.03.2.613391/2018 tanggal 05 Desember 2017 adalah sebesar Rp.14.500.949.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 7.144.117.000,- dan PNBPRP. 7.356.832.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2018 mengalami revisi sebanyak 4 kali yaitu :

- 2 kali revisi administrasi berupa perubahan nomenklatur, perubahan pejabat KPA, dan perubahan halaman III DIPA 3 kali (triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III)
- 2 kali revisi perubahan antar output dalam satu kegiatan dengan pagu tetap (kebijakan pimpinan pusat (refocusing) dan revisi pagu minus).

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

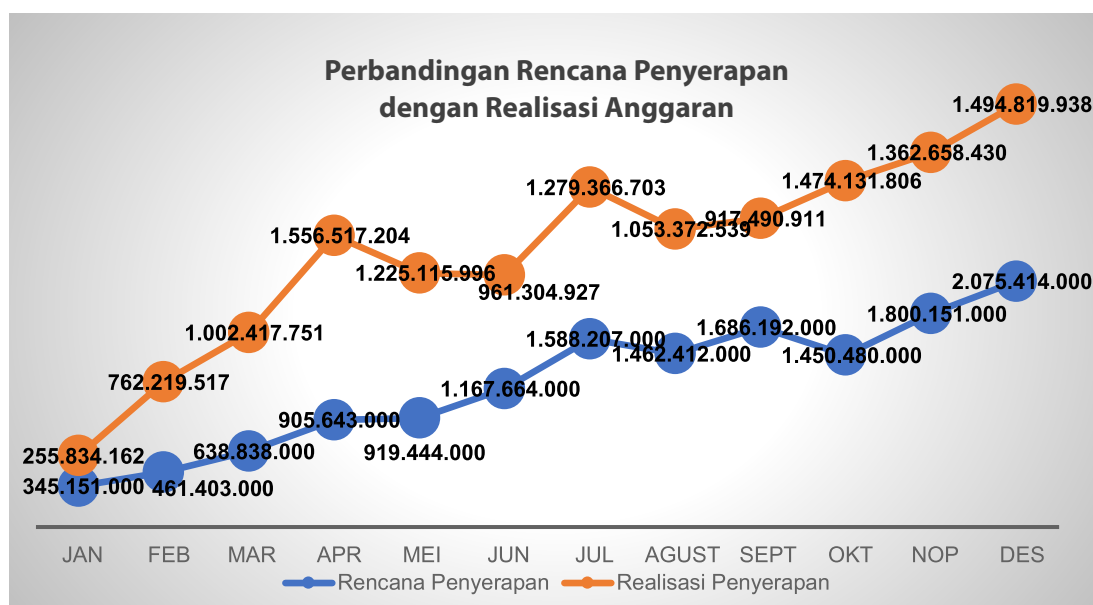
Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2018



Berdasarkan grafik realisasi anggaran di atas dapat disimpulkan :

- 1) Realisasi tertinggi Belanja pegawai terjadi di bulan Mei dan Juli, dikarenakan adanya pembayaran gaji, tunjangan kinerja ke 13 dan tunjangan hari raya.
- 2) Realisasi tertinggi Belanja barang terjadi di bulan April karena terbit Surat Edaran Maksimum Pencairan (MP) sebagai dasar Pencairan dana dari Sumber dana PNBP.
- 3) Belanja Modal baru direalisasikan pada Bulan September dan November.

Grafik Perbandingan Rencana Penyerapan dengan Realisasi Anggaran TA. 2018



Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi anggaran di atas diketahui terdapat deviasi antara rencana penyerapan anggaran dan realisasi anggaran. Deviasi tertinggi terdapat pada bulan April dengan deviasi sebesar – 71,87 % dan deviasi terendah terdapat pada bulan Oktober dengan deviasi sebesar – 3,34% serta rata-rata deviasi adalah -3.34. Jika dilihat dari rata-rata deviasi antara rencana penyerapan anggaran dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa deviasi yang terjadi masih terlihat wajar. Sehingga bisa dikatakan rencana dan penyerapan anggaran berjalan dengan baik.

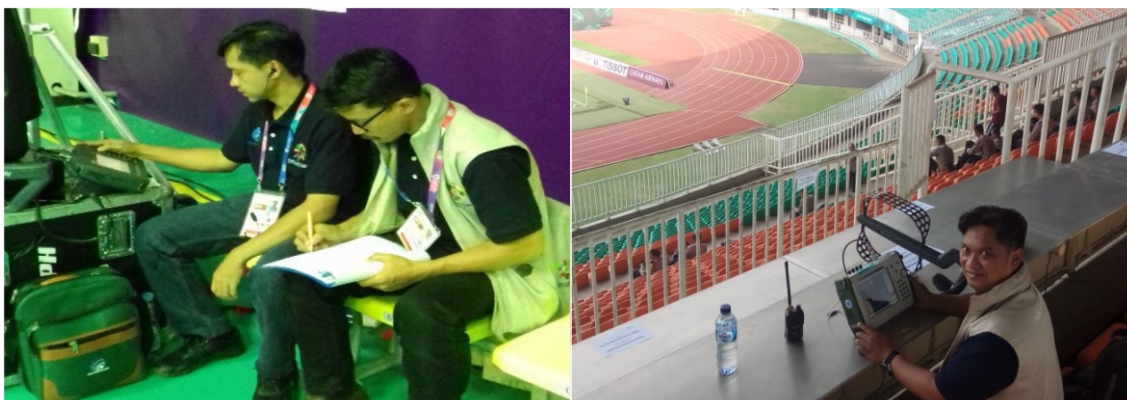
B. KINERJA LAINNYA

1. Dukungan Kegiatan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang

Kegiatan dukungan event Asian Games 2018 merupakan dukungan kegiatan event internasional yang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 02 September 2018 untuk venue yang ada di wilayah Jawa Barat di antaranya adalah Bendung Rentang-Majalengka, Subang Road Cycling Course, Stadion Pakansari, Stadion Patriot, Stadion Wibawa Mukti, dan Stadion Si Jalak Harupat. Kegiatan dukungan event Asian Games 2018, di antaranya:

- Penggunaan frekuensi radio untuk timing dan scoring digunakan pada event cabang olah raga balap sepeda road race dan individual time trial pada frekuensi 125 – 126 kHz;
- Penggunaan frekuensi radio pada range 411 – 435 MHz didominasi oleh penggunaan untuk komunikasi point to point dari para kontingen, panitia, dan para komite dalam mendukung kelancaran serta memantau proses jalannya perlombaan;
- Monitoring Penggunaan frekuensi radio pada range 518 – 870 MHz merupakan penggunaan frekuensi oleh broadcast yang meliputi jalannya perlombaan;
- Penggunaan frekuensi pada range 915 – 935 MHz termonitor adanya penggunaan untuk kegiatan Asian Games berupa broadcast dan termonitor downlink seluler;
- Penggunaan frekuensi pada range 2400 – 2483 MHz dari semua lokasi monitor termonitor telah terlayani oleh jaringan internet WiFi;
- Penggunaan frekuensi pada range 5150 – 5825 MHz dari semua lokasi monitor;
- Penggunaan frekuensi radio pada pelaksanaan event olah raga Handball teridentifikasi berupa broadcast berisi komunikasi pengaturan posisioning kamera yang aktif untuk meliputi pertandingan handball, pengaturan kamera dalam liputan pertandingan oleh tim broadcast dengan perintah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya pada range frekuensi 155.365-155.417 Mhz;

- Penggunaan frekuensi radio lainnya adalah untuk komunikasi para petugas Venue POPKI Cibubur terutama untuk pengaturan parkir Bus para kontingen dan para atlet yang akan bertanding berupa perangkat HT GSM sebanyak 15 unit dan 2 backup. Range frekuensi yang aktif digunakan di Venue POPKI Cibubur adalah range frekuensi 150 – 175 MHz.



Dukungan Asian Games 2018 Venues Cibubur

Dukungan Asian Games 2018 Venues Pakansari Cibinong

2. Upgrade ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015

Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 merupakan pengembangan dari standar sistem manajemen mutu sebelumnya yang telah banyak diterapkan oleh industri maupun instansi pemerintahan. Dengan telah ditetapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, maka penerapan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 perlu dilakukan pembaruan (upgrading) menjadi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Upgrading sistem manajemen mutu ini merupakan inti dari semua kegiatan pendampingan upgrading sistem manajemen mutu. Pada tahap ini dilakukan pembaruan terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, pada tahapan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang masih kurang memadai untuk pemenuhan persyaratan manajemen mutu ISO 9001:2015. Sehingga dari kegiatan ini menghasilkan perbaikan kebijakan mutu dan perbaikan sasaran mutu, daftar resiko, rencana mitigasi resiko, dan rencana perbaikan.

Pada tanggal 13-14 September telah dilaksanakan Audit Eksternal untuk keperluan upgrade sistem manajemen mutu. Dari hasil audit tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berhasil mendapat sertifikasi ISO 9001:2015 per September 2018.



C. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung semula berjumlah sebesar Rp. **14.500.949.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **13.345.249.884,-** atau **92.03%**.

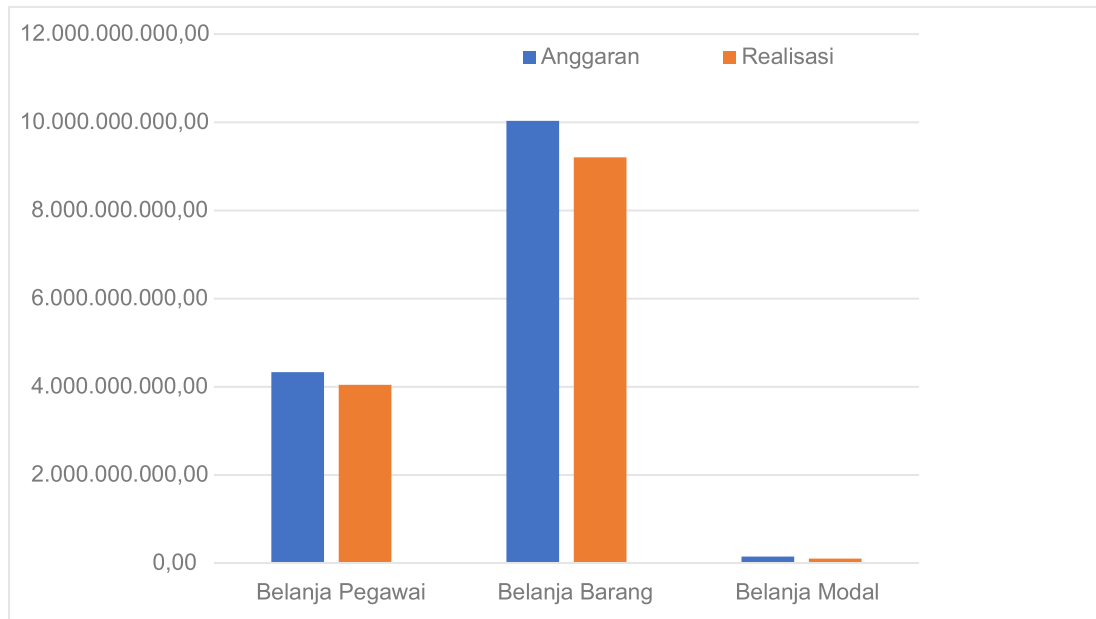
Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	2.140.199.500	1.803.401.818	84.26%
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	12.360.749.500	11.541.848.066	93.37%
TOTAL	14.500.949.000	13.345.249.884	92.03%

Laporan Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 13.345.249.884 atau 92.03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.500.949.000 dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

URAIAN	Periode 31 Desember 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	4.329.799.000	4.036.662.126	93,23
Belanja Barang	10.031.600.000	9.206.886.356	91,78
Belanja Modal	139.550.000	101.701.402	72,88
Total Belanja	14.500.949.000	13.345.249.884	92,03

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas I Bandung	1.304.795.000	1.222.788.301	93,71
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Bandung	348.955.000	318.352.026	91,23
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI	3.946.148.000	3.459.862.880	87,68
Layanan Internal (Overhead)	139.550.000	101.701.402	72,88
Layanan Perkantoran	8.761.501.000	8.242.545.275	94,08
Total	14.500.949.000	13.345.249.884	92,03

Bab IV Penutup

Pada Tahun 2018 sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Bandung tahun 2018, telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisiensi dan Efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 113.03%.

Seluruh Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan Kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio, 6 (enam) Indikator Kinerja (IK) mampu mencapai target lebih dari 100%, 2 (dua) Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai target dengan capaian 100% serta 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisiensi dan Efektif juga mampu menunjukkan kinerja sesuai target dengan capaian 100%. Dalam hal penyerapan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dari Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar Rp.14.500.949.000,- terealisasi sebesar Rp.13.345.249.884,- atau 92.03%.

Dalam pelaksanaan program kerja, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdapat kendala yaitu adanya keterbatasan alat ukur frekuensi dan penunjangnya, hal ini tidak sebanding dengan kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dan tingginya tingkat gangguan frekuensi penerbangan yang dalam penanganannya tidak bisa ditunda karena merupakan resiko tinggi. Mengingat pengadaan perangkat monitoring frekuensi tidak bisa lagi diadakan di UPT, kami berharap Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung bisa menjadi prioritas dalam pengadaan perangkat monitoring frekuensi yang menjadi wewenang dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Laporan Kinerja ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dengan demikian, laporan ini merupakan evaluasi kinerja dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan kegiatan, tugas dan fungsi di masa yang akan datang.